

artinya para Stakeholder bersatu padu dalam merumuskan strategi yang tepat yang akan digunakan dalam mensosialisasikan Program Generasi Berencana ini, pihak BKKBN sendiri sudah mengeluarkan strategi dengan berbagai cara mensosialisasikan Program Generasi Berencana ini dengan mengeluarkan materi-materi berbentuk leaflet, atau buku atau modul yang distribusikan ke OPDKB Kabupaten Bengkulu Tengah dan agar materi-materi tersebut disampaikan langsung ke kelompok Genre, PIK-R, atau BKR yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Aksi yang dilakukan dalam advokasi artinya melakukan kegiatan dan kekompakan antar para stakeholders dari pembahasan di atas bahwa memang tujuan para stakeholders yaitu BKKBN, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sama, mereka berharap dengan adanya Program Generasi Berencana ini para remaja mengetahui bahaya dari menikah di usia muda sesuai dengan isi dari program generasi berencana itu sendiri, dan tentunya di dukung juga oleh Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2018 tentang pencegahan pernikahan anak dan kedepannya diharapkan dapat membentuk remaja yang berkualitas.
4. Evaluasi dalam advokasi program generasi berencana ini adalah tujuan yang diharapkan ke depan tentang isi Program Generasi Berencana ini. Advokasi itu penting untuk mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan masalah yang rumit. Tujuan yang diharapkan dari Advokasi dalam sosialisasi program generasi berencana ini adalah untuk membawa para stakeholder, remaja dan

masyarakat itu sendiri bersama-sama dalam suasana mendukung secara sistematis memecahkan masalah yang ada dan muncul yang tidak bisa dengan mudah diselesaikan oleh salah satu pihak saja yaitu BKKBN. Advokasi Program Generasi Berencana dalam mengatasi pernikahan usia muda harus fokus pada peningkatan, komunikasi kapasitas para stakeholder dengan masyarakat dan remaja sebagai sasaran dari Program Generasi Berencana ini dan efisiensi sekaligus hasil yang baik untuk ke depannya.

5.1.2 Faktor-faktor pendorong dan penghambat Advokasi Program Generasi Berencana dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Faktor Pendorong

Konstitusi dalam Advokasi Program Generasi Berencana ini sudah cukup jelas di dukung oleh Peraturan Gubernur Bengkulu. Konstitusi yang jelas menjadi kekuatan dalam lingkungan advokasi dan juga keterlibatan masyarakat dalam mendukung suksesnya program generasi berencana ini. Tetapi masyarakat kurang ikut serta dalam program generasi berencana ini.

2. Faktor Penghambat

- 1) Komunikasi antar stakeholders merupakan faktor penting agar Advokasi dapat berhasil, diharuskan untuk mengidentifikasi kapan dan bagaimana advokasi sehingga sangat penting untuk dilakukan namun nyatanya dalam advokasi Program Generasi Berencana di Kabupaten Bengkulu Tengah, para Stakeholder yang terlibat seperti BKKBN, Dinas Kesehatan dan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengadakan pertemuan khusus seperti yang seharusnya dilakukan. Ketiga stakeholder tersebut hanya mengadakan pertemuan jika akan mengadakan sosialisasi saja, tetapi dengan situasi pandemi seperti sekarang ini maka berkurangnya intensitas pertemuan dan sosialisasi kepada remaja juga sosialisasi ke sekolah-sekolah maka menyebabkan tidak terjadinya pertemuan para stakeholder untuk membahas masalah program generasi berencana ini.

- 2) Sistem merupakan unsur yang penting dalam advokasi. Biaya merupakan faktor yang menjadi penghambat di sistem dalam advokasi program generasi berencana karena keterbatasan biaya dari para pihak BKKBN dalam mensosialisasikan program ini. Remaja merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Karena remaja merupakan generasi penerus bangsa, dan juga program generasi berencana ini belum menggunakan strategi yang tepat karena belum terjangkaunya sosialisasi ke sekolah-sekolah yang di pelosok, kurangnya kegiatan seminar dan diskusi dengan remaja sebagai sasaran dari program generasi berencana ini.
- 3) Sumberdaya yang diperlukan dalam Advokasi Program Generasi Berencana ini kurang banyak dan kurang berkoordinasi dengan baik, perlu banyak pihak yang berkompetensi dan sesuai dengan keahlian masing-masing yang memberikan informasi tentang isi dari program generasi berencana ini yaitu program yang dibuat untuk mengatasi kenakalan remaja.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat peneliti uraikan mengenai Advokasi Program Generasi Berencana di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut:

1. Perlu adanya diskusi antar para stakeholders yaitu BKKBN, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah mengenai pelaksanaan program generasi berencana untuk meningkatkan partisipasi sekolah dalam program generasi berencana ini dan mengubah pola pikir dari hasil program yaitu tidak hanya berfokus terhadap permasalahan keuangan ataupun sumber daya sebagai penghalang terlaksananya suatu program atau kegiatan. Adanya kekurangan anggaran akibat pemangkasan APBD, maka disarankan penambahan dan pengalokasian anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan KIE, tidak hanya untuk kegiatan secara umum, namun kegiatan di fokuskan pada peningkatan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
2. Perlu ditingkatkan kepedulian semua pihak diluar unit kerja yang terlibat dalam program generasi berencana ini seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan terutama masyarakat itu sendiri, maka disarankan kegiatan forum dilakukan lebih intensif dan dijadwalkan minimal 1 bulan sekali dilakukan sosialisasi melalui kegiatan beragama misalnya melalui para ustadz dalam melakukan kajian.
3. BKKBN seharusnya membuat forum diskusi antar Stakeholders yang ikut andil dalam menjalankan program generasi berencana di Provinsi Bengkulu

khususnya pemerintah Kabupaten Bengkulu tengah, seperti melakukan pertemuan ataupun rapat berkala untuk mengevaluasi pelatihan atau program yang akan dijalankan maupun telah dijalankan yaitu pertemuan sebulan sekali antar pihak, baik kecamatan dengan kabupaten atau antar Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang terlibat. Hal tersebut dilakukan agar dapat segera diketahui apa saja permasalahan ataupun keluhan yang dihadapi, sehingga solusi yang akan diberikan tidak menghambat sosialisasi program generasi berencana ini dan dapat tersampaikan dengan baik kepada remaja di Kabupaten Bengkulu Tengah.

4. Untuk mengatasi metode sosialisasi yang dilakukan secara konvensional, maka disarankan perlu sosialisasi dan KIE dengan cara informal, tidak hanya formal. Agar komunikasi dengan sasaran berjalan dua arah. Misalnya pada tempat-tempat yang bisa untuk berkumpul para remaja yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, B. D. (2019). Analisis Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017. *Jurnal KesmasAsclepius*, 1(1), 14–24.
- Ali, Muhammad. dkk. (2017). Implementasi Kebijakan *Collaborative Governance* Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ulul Albab* (Vol. 22 No. 1; 6-12)
- Andi Surahman Batara, Muhammad Syafar, Sukri Palutturi, Stang. Pentingnya Kolaborasi Stakeholder dalam mewujudkan Terminal Sehat di Sulawesi Selatan. Volume 1 No 17-20, Januari 2018 issue 1.
- Anggara, Sahya MSI . Kebijakan Publik. 2014. Bandung : Pustaka setia
- Ansell, Chris, dan Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol. 18 No.4, hal 543-571.
- Arlianis, A. (2019). *Tingkat kolaborasi pengarang dari sudut pandang pustakawan*. 1–9.
bps.go.id. (n.d.).
- Bachri BS. Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *J Teknol Pendidik*. 2010;10(1):46–62.
- Brown Susan L. *Marriage and Child Well-Being: Research and Policy Perspectives*. October 2010, Vol. 72, No. 5
- Chalik, I. (2020). Perkawinan Usia Anak Dapat Tingkatkan Angka Perceraian. *Bengkulu BKKBN*. Retrieved from <http://bengkulu.bkkbn.go.id/?p=2601>
- Ciptaningsih, Rizka, H. N. (1390). Kolaborasi Stakeholders dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Jakarta : Pustaka Belajar
- Dewi, Ratna Trisuma. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil. Surakarta: Universitas